PENERAPAN PRINSIP LEX LOCI CONTRACTUS DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA: KAJIAN TERHADAP KONTRAK INVESTASI ASING DI INDONESIA

Anita Shofia Darrohmah¹, Fanny Shinta Permatahati², Nova Auliyanti Faiza³, Oksa Romadhona Handayani⁴, Yuriskafrida Giar Maharani⁵, Zahra Khumairoh⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Surakarta

anitashofia26@gmail.com¹, shintafannyp10@gmail.com², aulyantinova@gmail.com³, romadhonaoksa@gmail.com⁴, yuriskaafird@gmail.com⁵, zahrakhumairoh159@gmail.com⁶

ABSTRACT; *The application of legal principles to regulate contracts is very important in every investment transaction so that the Lex Loci Contractus Principle is one of the legal aspects of foreign investment contracts both in Indonesia and other countries. Therefore, the author aims to analyze whether the Lex Loci Contractus Principle can be a reference to protect the rights of investors and the State that will bind both parties to foreign investment contracts and how to resolve international contract disputes in Indonesia. In this study, the author uses a literature study study, which focuses on the analysis and evaluation of documents and written sources related to the Lex Loci Contractus principle in the Indonesian legal system. The integrity of this principle can not only protect domestic interests but also adapt to the ever-changing needs of the global market. However, there is still a discrepancy between the legal provisions that apply in Indonesia and global developments in international civil law.*

Keywords: *Contract, Lex Loci Contractus Principle, Foreign Investment.*

ABSTRAK; Penerapan Prinsip hukum untuk mengatur kontrak sangatlah penting dalam setiap transaksi investasi sehingga dengan adanya Prinsip Lex Loci Contractus menjadi salah satu aspek hukum terhadap kontrak investasi asing baik di Negara Indonesia ataupun Negara lainnya. Sehingga penulis bertujuan untuk menganalisis apakah dalam Prinsip Lex Loci Contractus dapat menjadi acuan untuk melindungi hak-hak investor dan Negara yang akan mengikat kedua belah pihak yang melakukan kontrak investasi asing dan bagaimana penyelesaian sengketa kontrak internasional di Indonesia. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan kajian studi literatur, yang berfokus pada analisis dan evaluasi dokumen serta sumber-sumber tertulis terkait prinsip Lex Loci Contractus dalam sistem hukum Indonesia. Integritas prinsip ini tidak hanya dapat melindungi kepentingan domestik tetapi juga dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar global yang terus berubah. Namun tetap ada Ketidacocokan antara ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan perkembangan global dalam hukum perdata internasional.

Kata Kunci: Kontrak, Prinsip Lex Loci Contractus, Investasi Asing.

PENDAHULUAN

Perkembangan investasi asing di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan. Lingkungan hukum yang jelas dan terjamin sangat dibutuhkan untuk menarik lebih banyak investor asing. Keberadaan hukum yang transparan dapat memberikan rasa aman bagi investor dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi investasi melibatkan aspek hukum yang kompleks, terutama terkait dengan kontrak. Kontrak menjadi landasan bagi hubungan bisnis antara investor dan negara. Pengaturan hukum yang mengatur kontrak harus diperhatikan secara serius.¹ Penerapan prinsip hukum internasional dalam pengaturan kontrak sangat penting. Prinsip *Lex Loci Contractus* menjadi salah satu aspek yang harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat. *Lex Loci Contractus* mengacu pada hukum tempat di mana kontrak tersebut dibuat dan dilaksanakan. Prinsip ini memiliki implikasi besar terhadap validitas dan pelaksanaan kontrak. Hal ini sejalan dengan temuan Madziwa (2020) yang menekankan pentingnya lokasi kontrak dalam hukum perdata internasional. Lokasi di mana kontrak diadakan dapat mempengaruhi isi dan penegakan hukum kontrak tersebut.²

Dalam praktiknya, penerapan prinsip *Lex Loci Contractus* menghadapi berbagai tantangan. Terutama ketika melibatkan pihak dari negara yang berbeda dengan sistem hukum yang berbeda pula. Perbedaan hukum ini dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian hukum. Kasus *Chatenay v Brazilian Submarine Telegraph Co* menunjukkan bagaimana hukum kontrak internasional dapat diterapkan ketika hukum lokasi kontrak dan hukum pelaksanaan adalah sama. Penegasan ini menekankan pentingnya keselarasan hukum di tingkat internasional (Pollock & Wald, 2024).³ Persoalan lain muncul ketika investor asing menghadapi sengketa hukum di Indonesia. Proses penyelesaian sengketa sering kali menjadi rumit. Ketidakpastian mengenai hukum yang berlaku dapat menjadi penghalang bagi investor untuk menuntut hak-haknya. Penerapan prinsip *Lex Loci Contractus* dapat berfungsi sebagai acuan. Namun, implementasinya dalam penyelesaian sengketa internasional tetap

¹ Hs, H. S., SH, M., Abdullah, H., Wiwiek Wahyuningsih, S. H., & Kn, M. (2023). *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Sinar Grafika.

² Madziwa, C. S. (2020). *The Role of the Locus Contractus as a Connecting Factor in Common-Law Private International Law of Contract*. University of Johannesburg (South Africa).

³ Pollock, F., & Wald, G. H. (2024). *Principles of Contract at Law and in Equity*. BoD—Books on Demand.

membutuhkan perhatian yang lebih. Dalam buku *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Salim (2021) menjelaskan pentingnya keselarasan dalam penyusunan kontrak untuk menghindari potensi konflik di masa depan.⁴

Peraturan investasi asing di Indonesia mengharuskan pemahaman mendalam mengenai hukum kontrak. Hal ini berfungsi untuk melindungi hak-hak investor dan negara. Sistem hukum yang baik dapat memberikan jaminan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, buku *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik* oleh Emirzon et al. (2021) menjelaskan pentingnya pemahaman hukum kontrak dalam konteks praktik di Indonesia. Pengetahuan mengenai prinsip *Lex Loci Contractus* menjadi salah satu aspek kunci dalam penyusunan kontrak yang sukses. Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip *Lex Loci Contractus* tidak bisa diabaikan. Penegakan hukum yang berbeda di setiap negara dapat menyebabkan ketidakpastian. Hakim dan arbitrator harus menggunakan diskresi mereka dalam menangani kasus-kasus tersebut. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengadaptasi hukum yang berlaku secara internasional.⁵

Di Indonesia, penerapan prinsip ini memerlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai konteks lokal. Faktor-faktor lokal harus diperhatikan dalam penegakan hukum kontrak. Kesesuaian antara hukum internasional dan hukum nasional menjadi hal yang krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan *Lex Loci Contractus* dalam kontrak investasi asing di Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran mengenai tantangan hukum yang mungkin dihadapi. Kejelasan hukum dalam investasi asing akan berdampak positif terhadap iklim investasi. Investasi yang lebih besar dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat seiring dengan peningkatan investasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan. Pemahaman yang mendalam mengenai prinsip *Lex Loci Contractus* dapat membantu meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. Penerapan prinsip *Lex Loci Contractus* dalam kontrak investasi asing sangat relevan. Penerapan prinsip ini memberikan arah dalam penyusunan kontrak yang mengikat kedua belah pihak.

⁴ Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika

⁵ Emirzon, H. J., SH, M., Is, M. S., & SHI, M. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Prenada Media.

1. Rumusan Masalah
2. Bagaimana prinsip Lex Loci Contractus diterapkan dalam kontrak investasi asing di Indonesia?

Apa saja tantangan hukum dalam penerapan prinsip Lex Loci Contractus pada penyelesaian sengketa kontrak internasional di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur, yang berfokus pada analisis dan evaluasi dokumen serta sumber-sumber tertulis terkait penerapan prinsip Lex Loci Contractus dalam hukum perdata internasional Indonesia, khususnya dalam konteks kontrak investasi asing. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif, teori, dan argumen yang telah dikemukakan oleh para ahli di bidang hukum perdata internasional dan hukum investasi. Peneliti akan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta literatur akademis yang relevan. Sumber-sumber ini akan digunakan untuk memahami bagaimana prinsip Lex Loci Contractus diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia dan tantangan yang dihadapi oleh investor asing. Studi literatur ini juga mencakup analisis komparatif terhadap praktik di negara lain yang menerapkan prinsip serupa dalam hukum perdata internasional. Peneliti akan membandingkan pendekatan hukum yang diambil oleh Indonesia dengan sistem hukum di negara-negara lain untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas dan relevansi penerapan prinsip Lex Loci Contractus dalam kontrak investasi asing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Lex Loci Contractus Dalam Kontrak Investasi Asing Di Indonesia

Prinsip Lex Loci Contractus dalam hukum perdata internasional Indonesia memiliki peran penting dalam menentukan hukum yang berlaku atas kontrak-kontrak yang melibatkan unsur asing, termasuk dalam kontrak investasi asing. Prinsip ini mengacu pada penerapan hukum tempat di mana kontrak dibuat. Dalam konteks kontrak investasi asing, ketentuan mengenai Lex Loci Contractus memiliki relevansi dalam menentukan yurisdiksi hukum yang akan diberlakukan dalam penyelesaian sengketa, terutama ketika melibatkan pihak asing dan aspek lintas negara (Salim, 2021). Penelitian Salim (2021) menguraikan bagaimana Lex Loci Contractus sering digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kontrak investasi asing di

Indonesia. Dalam hal ini, pemilihan hukum tempat kontrak dibuat sangat menentukan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.⁶

Kasus *Chatenay v Brazilian Submarine Telegraph Co* menjadi salah satu contoh penting dalam penerapan *Lex Loci Contractus*. Dalam kasus ini, pengadilan menegaskan bahwa ketika hukum tempat pembuatan kontrak dan hukum tempat pelaksanaan kontrak adalah sama, maka aturan tersebut akan berlaku dalam penyelesaian sengketa (Madziwa, 2020). Di Indonesia, ketentuan mengenai *Lex Loci Contractus* juga banyak diterapkan dalam penyelesaian sengketa kontrak investasi asing, di mana prinsip ini memastikan adanya kepastian hukum bagi investor asing yang beroperasi di Indonesia. Pemilihan hukum ini seringkali berfungsi sebagai dasar dalam menentukan yurisdiksi yang paling sesuai.⁷

Dalam konteks perjanjian perdagangan bebas, prinsip *Lex Loci Contractus* juga berperan penting, terutama dalam hal pengaturan sengketa perdata internasional yang melibatkan unsur lintas batas. Penelitian yang dilakukan oleh Dimlana et al. (2024) menekankan bahwa prinsip-prinsip hukum perdata internasional, termasuk *Lex Loci Contractus*, memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari kontrak-kontrak internasional, termasuk dalam kerangka perjanjian perdagangan bebas. Prinsip ini memberikan pedoman tentang hukum mana yang berlaku ketika terjadi sengketa, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak.⁸

Penelitian Emirzon et al. (2021) juga menyoroti pentingnya penerapan *Lex Loci Contractus* dalam penyusunan kontrak investasi asing di Indonesia. Menurut mereka, prinsip ini memberikan kejelasan mengenai hukum yang berlaku atas kontrak, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam investasi asing. Dalam kasus-kasus investasi asing, sering kali kontrak dibuat di luar Indonesia, tetapi dilaksanakan di dalam Indonesia, sehingga penerapan prinsip *Lex Loci Contractus* dapat menentukan hukum mana yang berlaku, baik hukum Indonesia maupun hukum negara lain.⁹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Monalisa (2024), ditekankan bahwa era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat semakin menuntut adanya pengaturan hukum yang

⁶ Salim, H. S. (2021). Ibid.

⁷ Madziwa, C. S. (2020). Ibid.

⁸ Dimlana, R. S., Irsan, L. Y., Darmawan, M. F., Sukmana, M. N. R., & Wijaya, M. M. (2024). Implikasi Perjanjian Perdagangan Bebas Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional: Analisis Mendalam Tentang Pada Pemberlakuan Penyelesaian Sengketa Internasional. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 138-152.

⁹ Emirzon, H. J., SH, M., Is, M. S., & SHI, M. (2021). Ibid.

adaptif, terutama dalam konteks investasi asing. Lingkungan bisnis global yang dinamis memerlukan respons hukum yang cepat dan fleksibel. Ketidakpastian hukum dapat menghambat arus investasi, sehingga sangat penting bagi negara untuk mengembangkan regulasi yang sesuai dengan tren dan praktik internasional. Adaptasi hukum menjadi elemen kunci untuk menarik minat investor asing yang mencari kepastian dan keamanan dalam berinvestasi. Penerapan prinsip *Lex Loci Contractus* menjadi penting dalam hal ini, karena dapat memastikan bahwa hukum yang berlaku atas kontrak investasi asing di Indonesia telah disesuaikan dengan kebutuhan global. Prinsip ini memungkinkan para pihak dalam kontrak untuk memilih hukum yang paling relevan dan efektif dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Dengan mengakui dan menerapkan prinsip ini, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya untuk berintegrasi lebih dalam dengan standar hukum internasional. Hal ini juga menciptakan kepercayaan di kalangan investor, yang merasa lebih nyaman ketika hukum yang berlaku diakui secara luas. Monalisa juga menyoroti pentingnya prinsip ini dalam menjaga relevansi sistem hukum nasional Indonesia di tengah-tengah interaksi ekonomi global yang semakin kompleks. Hukum yang statis akan cepat kehilangan daya tarik dalam era di mana perubahan terjadi dengan sangat cepat. Integrasi prinsip *Lex Loci Contractus* dalam sistem hukum Indonesia dapat menjawab tantangan ini. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya dapat melindungi kepentingan domestik tetapi juga dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar global yang terus berubah.¹⁰

Selain itu, buku yang ditulis oleh Mesra (2023) mengenai hukum dagang menguraikan bagaimana prinsip *Lex Loci Contractus* berperan dalam mendukung kebebasan berkontrak bagi para pelaku bisnis, termasuk dalam transaksi investasi asing. Mesra menekankan bahwa kebebasan berkontrak merupakan elemen penting dalam perdagangan internasional, dan penerapan *Lex Loci Contractus* dapat memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam memilih hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini menjadi sangat relevan dalam investasi asing, di mana pihak-pihak dari berbagai negara perlu memiliki kepastian hukum dalam menjalankan transaksi mereka di Indonesia.¹¹

Dalam praktik hukum di Indonesia, prinsip *Lex Loci Contractus* juga sering kali digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan MoU dan kontrak-kontrak komersial lainnya,

¹⁰ Monalisa, G. (2024). Integrasi Hukum Perdata Internasional dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia: Tantangan dan Implikasi. *Palangka Law Review*, 4(2), 62-71.

¹¹ Mesra, R. (2023). *Buku Ajar Hukum Dagang*.

terutama yang melibatkan pihak asing. Salim et al. (2023) menjelaskan bahwa penerapan prinsip ini dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa. Dalam hal investasi asing, penerapan *Lex Loci Contractus* dapat memastikan bahwa para pihak memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi kepentingan mereka dalam perjanjian tersebut.¹²

Tantangan Hukum Dalam Penerapan Prinsip *Lex Loci Contractus* Pada Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional Di Indonesia

Penerapan prinsip *Lex Loci Contractus* dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan hukum yang signifikan. Penelitian Risnain (2018) menunjukkan bahwa ketentuan hukum perdata internasional, terutama yang berkaitan dengan investasi, memerlukan harmonisasi untuk mengakomodasi kebutuhan perkembangan ekonomi nasional dan globalisasi. Dalam konteks ini, pasal-pasal dalam hukum perdata internasional di Indonesia tidak lagi mencukupi untuk menjawab kebutuhan hukum yang berkembang, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional. Masalah ini terlihat jelas pada kasus di mana investasi asing berhadapan dengan ketentuan hukum domestik yang tidak sejalan dengan praktik internasional, mengakibatkan konflik yang berkepanjangan.¹³

Negara sebagai subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional juga memiliki dampak pada penerapan prinsip *Lex Loci Contractus*. Ketentuan hukum yang dijelaskan oleh Kasih et al. (2021) menunjukkan bahwa negara memiliki kedaulatan untuk mengatur barang dan jasa yang masuk ke dalam wilayahnya. Ketidakjelasan mengenai posisi negara sebagai pembeli dalam kontrak internasional dapat menyebabkan sengketa hukum yang kompleks. Ketika negara berperan sebagai pembeli melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ada tantangan dalam menerapkan prinsip kebebasan berkontrak dan pemilihan forum penyelesaian sengketa yang sesuai. Hal ini menjadi rumit ketika BUMN terlibat dalam kontrak dengan investor asing yang tidak selalu memahami nuansa hukum Indonesia.¹⁴

¹² Salim, H. S. (2021). *Ibid.*

¹³ Risnain, M. (2018). Optimalisasi Peranan Hukum Perdata Internasional Sebagai Hukum Antar Tata Hukum Ekstern Dalam Pembangunan Perekonomian Nasional Dan Globalisasi. *Unizar Law Review (ULR)*, 1(2), 177-190.

¹⁴ Kasih, D. P. D., Dharmawan, N. K. S., Salain, M. S. P. D., & Dwijyanthi, P. T. (2021). Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 354-369.

Dalam bidang jual beli kapal, tantangan hukum semakin nyata. Penelitian Mokohama (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli kapal sering kali menghadapi masalah administratif yang kompleks. Salah satu isu utama adalah ketidakpatuhan terhadap prosedur pendaftaran kapal. Ketidakpatuhan ini dapat menyebabkan kapal tidak terdaftar sebagai kapal Indonesia. Keadaan ini menimbulkan tantangan yang signifikan dalam proses penyelesaian sengketa. Ketika kapal tidak terdaftar, konsekuensi hukum yang muncul dapat berakibat fatal. Penyelesaian sengketa terkait kontrak menjadi semakin sulit dan memakan waktu. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian mungkin mengalami kerugian yang substansial. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat finansial tetapi juga mencakup potensi hilangnya kesempatan bisnis di pasar internasional. Dampak negatif ini dapat mengganggu kepercayaan investor terhadap sistem hukum dan regulasi di Indonesia. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan dari masalah administratif ini dapat berujung pada kebatalan perjanjian. Kebatalan perjanjian tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat tetapi juga berdampak pada reputasi pasar Indonesia. Pasar yang dianggap tidak stabil atau tidak dapat diandalkan dapat menjauhkan investor asing. Hal ini semakin memperburuk kondisi ekonomi, terutama dalam sektor perdagangan internasional yang memerlukan kepastian dan kejelasan hukum.¹⁵

Kedudukan negara dalam konteks hukum internasional juga memberikan implikasi serius bagi penerapan prinsip *Lex Loci Contractus*. Penelitian Amalia et al. (2018) menunjukkan bahwa penerapan prinsip itikad baik dalam pilihan hukum kontrak memiliki dampak signifikan. Dalam situasi di mana kontrak melibatkan lebih dari satu negara, pemahaman terhadap hukum yang berlaku di negara lain menjadi sangat krusial. Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak harus menyadari bahwa hukum domestik dapat berbeda dengan hukum yang berlaku di negara asal mereka. Ketidapkahaman ini dapat menimbulkan masalah dalam implementasi kontrak. Ketika terjadi sengketa, ketidapkahaman terhadap hukum yang berlaku dapat menyebabkan ketidakadilan. Pihak yang merasa dirugikan akibat ketidapkahaman ini berpotensi tidak mendapatkan keadilan yang semestinya. Hal ini berisiko mengganggu kepercayaan dalam hubungan investasi. Investor asing yang tidak memperhitungkan hukum domestik Indonesia dapat menghadapi tantangan serius. Potensi terjadinya pelanggaran hak menjadi lebih tinggi, yang dapat menciptakan ketidakpastian dalam berinvestasi. Pelanggaran hak ini tidak hanya berdampak pada pihak yang dirugikan tetapi juga memengaruhi iklim

¹⁵ Mokohama, T. M. (2021). Kebatalan Perjanjian Jual Beli Kapal Akibat Wanprestasi. *Lex Crimen*, 10(11).

investasi secara keseluruhan. Ketidakpastian hukum dapat mengurangi minat investor untuk memasuki pasar Indonesia. Jika investor merasa bahwa hukum di negara tersebut tidak memberikan perlindungan yang memadai, mereka akan mencari alternatif lain. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk hubungan investasi antara Indonesia dan negara lain.¹⁶

Kompleksitas lebih lanjut muncul ketika menyangkut kejelasan dan kepastian hukum. Ketidakjelasan dalam pasal-pasal hukum perdata internasional yang berlaku saat ini menciptakan tantangan bagi pelaku bisnis. Dalam situasi di mana hukum tidak cukup jelas, pelaku bisnis menjadi ragu untuk mengambil keputusan. Ketidakpastian ini dapat mengganggu rencana investasi dan strategi bisnis. Pelaku bisnis membutuhkan kepastian untuk dapat memprediksi risiko yang mungkin dihadapi dalam transaksi internasional. Ketika kontrak internasional tidak mencantumkan ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian sengketa, hal ini menambah lapisan kompleksitas. Pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak memiliki pemahaman yang sama tentang hukum yang berlaku. Kebingungan ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik. Setiap pihak mungkin berargumentasi tentang keabsahan hukum yang berbeda, sehingga memperumit upaya untuk mencapai resolusi. Ketidakjelasan ini juga dapat mempengaruhi kemampuan pihak untuk melindungi hak-hak mereka. Ketidakpastian hukum tidak hanya menghambat proses penyelesaian sengketa tetapi juga memperburuk hubungan bisnis antarnegara. Ketika penyelesaian sengketa terhambat, kepercayaan antara para pihak berpotensi rusak. Hubungan bisnis yang sebelumnya baik dapat terganggu oleh ketidakpastian yang ditimbulkan. Dalam jangka panjang, ini dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis yang berharga. Pelaku bisnis yang melihat potensi sengketa cenderung menjadi lebih berhati-hati dalam berinvestasi.¹⁷

Harmonisasi hukum di tingkat internasional menjadi krusial dalam konteks ini. Ketika negara-negara memiliki kerangka hukum yang berbeda, tantangan dalam menyelesaikan sengketa internasional semakin kompleks. Standarisasi peraturan hukum dapat mengurangi kebingungan yang dialami oleh para pelaku bisnis. Ketidakpastian hukum sering kali muncul akibat perbedaan dalam interpretasi dan penerapan hukum di berbagai yurisdiksi. Dengan adanya harmonisasi, pengusaha dapat beroperasi dengan landasan hukum yang lebih

¹⁶ Amalia, R., Sabrie, H. Y., & Dian, W. (2018). The Principle of good faith in the choice of law of foreign direct investment contracts in Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 170-180.

¹⁷ Risnain, M. (2018). *Ibid.*

konsisten. Pengaturan yang lebih baik antara hukum domestik dan internasional dapat membantu mengatasi tantangan ini. Dalam praktiknya, harmonisasi hukum akan memfasilitasi penegakan kontrak dan penyelesaian sengketa. Proses pengusulan dan implementasi regulasi yang selaras dengan standar internasional dapat memperkuat kepastian hukum. Investor asing akan lebih tertarik untuk berinvestasi ketika mereka tahu bahwa sistem hukum negara tuan rumah mengikuti prinsip-prinsip yang diterima secara luas. Jika DPR dan Presiden dapat mengusulkan RUU Hukum Perdata Internasional, hal ini akan membantu dalam menjawab tantangan hukum yang dihadapi dalam konteks *Lex Loci Contractus*. RUU tersebut dapat menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk pengaturan kontrak internasional.¹⁸

Penerapan prinsip *Lex Loci Contractus* dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional di Indonesia merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh para pemangku kepentingan. Ketidakjelasan hukum, posisi negara sebagai subjek hukum, serta keperluan untuk harmonisasi antara hukum domestik dan internasional menjadi isu utama yang perlu segera diatasi. Hanya dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, Indonesia dapat menciptakan iklim hukum yang lebih baik untuk kontrak internasional, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan menarik lebih banyak investasi asing ke negara ini

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip *Lex Loci Contractus* dalam hukum perdata internasional Indonesia menunjukkan bahwa prinsip ini memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa kontrak investasi asing. Penerapan prinsip *Lex Loci Contractus* membantu dalam menentukan hukum yang berlaku berdasarkan lokasi tempat perjanjian dibuat dan dilaksanakan. Hal ini memberikan kejelasan hukum dan kepastian bagi para investor asing, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lingkungan investasi di Indonesia. Meskipun demikian, tantangan hukum tetap ada, terutama dalam hal harmonisasi regulasi yang ada dan penerapan prinsip ini dalam praktik. Ketidakcocokan antara ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan perkembangan global dalam hukum perdata internasional menjadi salah satu tantangan utama. Sebagai contoh, undang-undang yang mengatur investasi asing sering kali tidak sejalan dengan norma hukum internasional yang berlaku. Hal ini menyebabkan potensi

¹⁸ Monalisa, G. (2024). Integrasi Hukum Perdata Internasional dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia: Tantangan dan Implikasi. *Palangka Law Review*, 4(2), 62-71.

konflik yang dapat merugikan investor. Upaya untuk mengharmonisasikan undang-undang yang relevan, seperti undang-undang penanaman modal dan undang-undang arbitrase, perlu dilakukan agar prinsip *Lex Loci Contractus* dapat diterapkan secara efektif. Indonesia untuk wajib memperkuat dan memperbaiki kerangka hukum yang mendukung penerapan prinsip *Lex Loci Contractus* dalam kontrak investasi asing. Pengembangan undang-undang yang responsif terhadap dinamika pasar global dan perlunya dialog antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., Sabrie, H. Y., & Dian, W. (2018). The Principle of good faith in the choice of law of foreign direct investment contracts in Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 170-180.
- Dimlana, R. S., Irsan, L. Y., Darmawan, M. F., Sukmana, M. N. R., & Wijaya, M. M. (2024). Implikasi Perjanjian Perdagangan Bebas Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional: Analisis Mendalam Tentang Pada Pemberlakuan Penyelesaian Sengketa Internasional. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 138-152.
- Emirzon, H. J., SH, M., Is, M. S., & SHI, M. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Prenada Media.
- Hs, H. S., SH, M., Abdullah, H., Wiwiek Wahyuningsih, S. H., & Kn, M. (2023). *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Sinar Grafika.
- Kasih, D. P. D., Dharmawan, N. K. S., Salain, M. S. P. D., & Dwijayanthi, P. T. (2021). Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 354-369.
- Madziwa, C. S. (2020). *The Role of the Locus Contractus as a Connecting Factor in Common-Law Private International Law of Contract*. University of Johannesburg (South Africa).
- Mesra, R. (2023). *Buku Ajar Hukum Dagang*.
- Monalisa, G. (2024). Integrasi Hukum Perdata Internasional dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia: Tantangan dan Implikasi. *Palangka Law Review*, 4(2), 62-71.
- Mokohama, T. M. (2021). Kebatalan Perjanjian Jual Beli Kapal Akibat Wanprestasi. *Lex Crimen*, 10(11).
- Pollock, F., & Wald, G. H. (2024). *Principles of Contract at Law and in Equity*. BoD–Books on Demand.

Risnain, M. (2018). Optimalisasi Peranan Hukum Perdata Internasional Sebagai Hukum Antar Tata Hukum Ekstern Dalam Pembangunan Perekonomian Nasional Dan Globalisasi. *Unizar Law Review (ULR)*, 1(2), 177-190.

Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika